

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI Nomor 2 Tahun 1989), “pendidikan” adalah suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Sedangkan pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih jauh UUSPN tersebut di atas, menjelaskan juga bahwa penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan. Jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan.

Kemudian, GBHN 1993, menggariskan bahwa pendidikan luar sekolah, termasuk pendidikan yang bersifat kemasyarakatan seperti kepramukaan, berbagai kursus dan pelatihan keterampilan, perlu ditingkatkan kualitasnya dan diperluas dalam rangka mengembangkan sikap mental, minat, bakat, keterampilan, dan kemampuan anggota masyarakat serta menyiapkan dan memberi bekal kepada warga

belajar agar mampu bekerja dan berwirausaha serta meningkatkan martabat dan kualitas kehidupannya.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah, Pendidikan Luar Sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah, baik dilembagakan ataupun tidak. Lebih jauh PP No 73 Tahun 1991 tersebut di atas menjelaskan bahwa tujuan pendidikan luar sekolah adalah sebagai berikut :

1. Melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya.
2. Membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat dan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan
3. Memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah.

Pelaksanaan pendidikan luar sekolah dilakukan melalui beberapa bentuk satuan pendidikan, seperti kursus, kelompok belajar dan satuan pendidikan sejenis lainnya. Kursus diselenggarakan bagi warga belajar yang memerlukan bekal untuk mempersiapkan diri, bekerja mencari nafkah dan atau melanjutkan ke tingkat dan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kelompok belajar adalah strategi penyelenggaraan pendidikan luar sekolah yang mengandung arti “mengejar ketinggalan” dan/atau “belajar sambil bekerja.” Pelaksanaan pendidikan luar sekolah dalam bentuk satuan pendidikan lain, misalnya di dalam kelompok bermain, penitipan anak dan satuan pendidikan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Kalau kita memperhatikan perkembangan jalur pendidikan nasional, khususnya jalur pendidikan luar sekolah, jalur pendidikan luar sekolah ini sebenarnya telah ada sejak dulu, bahkan perkembangannya itu setua dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Sutaryat Trisnamansyah (1992:2) mengatakan bahwa :

..... pendidikan luar sekolah dalam bentuk yang paling asli (indigenious) telah ada sejak dulu, kehadirannya lebih dulu dari perkembangan pendidikan formal atau pendidikan persekolahan. Perkembangannya merentang sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama dan budaya yang dianut pada masing-masing masyarakat dimana mereka hidup menetap.

Pendidikan luar sekolah berkembang dari pendidikan tradisional yang biasanya berakar dalam ajaran agama dan tradisi yang dianut oleh warga masyarakat. Kehadiran agama dalam kehidupan masyarakat, telah sangat mewarnai perkembangan pendidikan luar sekolah. Berkaitan dengan perkembangan pendidikan luar sekolah yang dipengaruhi oleh agama, selanjutnya Djudju Sudjana (1991 : 55), menyatakan sebagai berikut :

Belajar membaca kitab suci, kaidah-kaidah agama, tatacara sembahyang, yang pada umumnya dilakukan di tempat-tempat peribadatan, merupakan kegiatan belajar membelajarkan yang mendasari situasi pendidikan luar sekolah, selain itu agama juga memberikan motivasi bahwa belajar itu merupakan kewajiban setiap pemeluk agama, dan kegiatan belajar dilakukan di dalam dan terhadap lingkungannya. Syarat utama yang perlu dimiliki oleh setiap individu untuk melakukan kegiatan belajar adalah kemampuan membaca. *“Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan” (Q.S. Al’ Alaq, ayat 1).*

Kewajiban umat untuk belajar, juga dipertegas lagi oleh Hadis Rosulullah SAW, seperti halnya dikutip Djudju Sudjana (1991 : 55) yaitu *“Tholabul ilmi faridhotun ala*

kulli muslimin wa muslimatin (memuntut ilmu adalah kewajiban bagi umat islam, baik pria maupun wanita”, juga “uthlubul ilma minal mahdi ilallahdi (tuntutlah ilmu sejak dalam buaian sampai masuk ke liang kubur)”

Pada perkembangan awalnya, bentuk-bentuk kegiatan lain dari pendidikan luar sekolah adalah seperti pelestarian dan pewarisan budaya secara turun-temurun. Kegiatan-kegiatan pendidikan luar sekolah merentang dari bentuk yang sederhana seperti dari seseorang kepada individu-individu lain sampai kepada bentuk yang kompleks, seperti upacara tradisional atau upacara adat yang dilakukan oleh kelompok yang cukup besar.

Memperhatikan beberapa penjelasan di atas, khususnya mengenai perkembangan pendidikan luar sekolah, nampak jelas bahwa pendidikan luar sekolah itu telah berkembang sejak dulu. Berkaitan dengan hal itu, Djudju Sudjana (1991:1) mengatakan bahwa :

Pendidikan luar sekolah (PLS) telah tumbuh dan berkembang dalam alur kebudayaan setiap masyarakat, dan sering bersumber pada agama dan tradisi yang dianut oleh masyarakat, sehingga kehadirannya memiliki akar yang kuat pada budaya yang dianut masyarakat.

Bentuk kegiatan dalam pendidikan luar sekolah sudah pasti tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor dinamis yang senantiasa berkembang dalam masyarakat. Faktor-faktor dinamis dalam masyarakat itu akan turut serta menentukan aksi pendidikan luar sekolah yang akan dilaksanakan, mengingat masyarakat berperan sebagai subyek dan sekaligus obyek dari kegiatan pendidikan luar sekolah. Berkaitan

dengan hal tersebut di atas, Sutaryat Trisnamansyah (1993 : 11) mengatakan ada lima faktor yang makin memantapkan bahwa pendidikan luar sekolah itu makin diperlukan dalam masyarakat. Kelima faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kependudukan
2. Perubahan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Kemajuan dan perkembangan informasi
4. Perubahan struktur masyarakat yang menuju ke arah/tahap masyarakat industri,
5. Ketenagakerjaan.

Kegiatan-kegiatan pendidikan luar sekolah senantiasa harus dapat menjawab berbagai tantangan pendidikan yang selalu berkembang dengan cepat di masyarakat. Bidang-bidang pendidikan yang tak tergarap oleh pendidikan sekolah, hendaknya menjadi lahan yang subur bagi pendidikan luar sekolah. Upaya peningkatan kualitas manusia melalui pencerdasan bangsa, tentu saja tak semuanya dapat dilakukan oleh pendidikan sekolah, mengingat masih adanya beberapa keterbatasan dalam pendidikan sekolah.

✓ Program-program aksi dalam pendidikan luar sekolah memang banyak dan tersebar dalam berbagai satuannya. Salah satu program yang relatif baru dan akan terus ditumbuhkembangkan adalah program keaksaraan fungsional. Program keaksaraan fungsional muncul sebagai alternatif baru setelah program-program sebelumnya, seperti pemberantasan buta huruf (PBH) dan Kejar Paket A yang menggunakan bahan belajar Buku Paket A1 sampai Paket A100.

Tantangan dunia pendidikan di negara kita, kian hari semakin majemuk. Kecenderungan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat

menuntut dunia pendidikan untuk terus menyelaraskan diri. Bila tidak pendidikan itu sendiri hanyalah berperan sebagai barang antik yang tak membumi dengan kebutuhan masyarakat. Pada saat ini dunia pendidikan kita dituntut untuk berpacu dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun pada sisi lain masih ada beberapa tantangan pendidikan yang masih sangat mendasar, yaitu masih adanya masyarakat yang buta huruf. Hal ini ditunjukkan dengan data BPS (Biro Pusat Statistik) bekerja sama dengan Depdikbud Tahun 1996, bahwa penyandang buta huruf usia 10 sampai 44 tahun adalah 5,86 % atau 6.903.272 orang.

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, telah menyatakan bahwa upaya pemberantasan buta huruf merupakan suatu kepedulian nasional, bahkan Mendikbud Juwono Sudarsono menargetkan bahwa pada tahun 2003 berbarengan dengan liberalisasi perdagangan bebas Asia (AFTA) di Indonesia sudah bebas penyandang buta huruf usia 10 – 44 tahun. Hal tersebut juga makin diperkuat oleh Presiden Republik Indonesia pada peringatan Hari Aksara Internasional ke-33 tanggal 12 September 1998 di Istana Negara, bahwa persoalan buta huruf bukan semata-mata persoalan teknis dalam kehidupan manusia, tetapi juga menyentuh hakikat yang lebih dalam lagi, yakni perlambang dari kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan. Upaya untuk mengatasi persoalan ini, telah ada sejak berabad-abad yang lalu, yaitu melalui pengenalan aksara untuk mendalami ajaran-ajaran agama, falsafah, sejarah, kesusastraan dan lain-lainnya. Kebudayaan Hindu, Budha dan Islam telah memperkenalkan tradisi baca-tulis dalam masyarakat, jauh sebelum masyarakat mengenal aksara Latin. Bahkan masyarakat suku di

berbagai daerah, juga telah mengembangkan aksara mereka sendiri-sendiri, seperti aksara Jawa, aksara Bugis-Makasar, aksara Lampung, aksara Aceh dan aksara suku-suku lainnya. Sedangkan, pengenalan terhadap huruf latin bagi masyarakat yang masih buta huruf latin, telah dimulai sejak setelah kemerdekaan. Pada saat itu penduduk yang melek huruf hanya sekitar 6 % saja dari jumlah penduduk secara keseluruhan. Setelah masa kemerdekaan, realisasi pemberantasan buta huruf merupakan tanggung jawab Jawatan Pendidikan Masyarakat yang ada dibawah Kementerian Pendidikan , Pengajaran dan Kebudayaan yang selanjutnya berubah menjadi Direktorat Pendidikan Masyarakat dibawah Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga Depdikbud. Pelaksanaan pemberantasan buta huruf setelah beberapa tahun telah menampakkan hasil yang menggembirakan, menurut Arif (1994: 2) menyatakan sebagai berikut :

..... jumlah buta huruf yang dalam tahun 1945 masih sebesar 94% telah menurun menjadi 60,8 % dalam tahun 1961, kemudian menurut Survey Penduduk Antar Sensus 1985 (SUPAS,1985) jumlah buta huruf telah menurun menjadi 15,7%. Sementara itu hasil Sensus Penduduk Tahun 1990 bahwa jumlah penduduk yang masih buta huruf usia 7 - 14 tahun masih sebanyak 8,5 juta.

Upaya pemberantasan buta huruf yang sedang dan masih akan terus dilakukan secara berkesinambungan, terutama bagi kelompok-kelompok marginal baik di daerah perkotaan maupun pedesaan telah mendorong pemerintah untuk melakukan aksi konkrit, yaitu Program Kejar Paket A. Menurut Depdikbud yang bekerja sama dengan UNICEF (1983:7) Program Kejar Paket A adalah

.....program kerja dan belajar dengan menggunakan Paket A sebagai sarana belajar untuk mengejar ketinggalan dengan memperhitungkan penggunaan dan pemanfaatan tenaga, biaya, waktu dan melaksanakan kegiatan atau aktifitas melalui wadah kelompok belajar.

Paket A itu sendiri merupakan seperangkat bahan belajar yang berisikan aspek-aspek kehidupan yang diperlukan oleh mereka yang buta huruf atau mereka yang putus sekolah dasar, agar mereka mampu menjadi warga negara yang produktif dan bertanggung jawab. Paket A tersebut dibuat dalam 100 booklet, setiap booklet diberi nomor mulai 1 sampai dengan 100. Selain itu, booklet-booklet Paket A juga diperkaya dengan bahan-bahan belajar tambahan, seperti poster, permainan, foto novela, kaset dsb. yang berisikan sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan tuntunan sikap mental ke arah penumbuhan inovasi pembangunan. Tujuan pemberantasan buta huruf di Indonesia menurut Depdikbud (1993 :3) adalah sebagai berikut :

1. Memberi kemampuan kepada mereka yang buta huruf agar dapat membaca, menulis, berhitung, bahasa Indonesia dan pengetahuan fungsional.
2. Menjadikan program pemberantasan buta huruf sebagai alat untuk kegiatan-kegiatan pembangunan lebih lanjut.
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan fungsional peserta didik.

Kegiatan pembelajaran dalam pemberantasan buta huruf diorganisir dalam bentuk kelompok-kelompok belajar. Jumlah anggota dalam kelompok belajar sebanyak-banyaknya terdiri atas 10 orang. Namun demikian dalam kenyataannya, jumlah anggota dalam kelompok belajar tersebut kadangkala melebihi 10 orang. Dalam setiap kelompok belajar dibantu oleh seorang tutor dan fasilitator. Tugas tutor

dan fasilitator secara ideal harus mampu menampilkan dirinya sebagai mitra warga belajar di dalam mengatasi berbagai kendala yang mungkin timbul dalam proses pembelajaran.

Kebijaksanaan operasional Mendikbud tahun 1994 khusus yang berkaitan dengan buta huruf adalah dengan dilaksanakannya Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Huruf. Program-program untuk penuntasan penyandang buta huruf ini telah lama dan banyak dilakukan seperti Program Kejar Paket A, Program PBH dan/atau Obama (Operasi Bhakti ABRI Manunggal Aksara).

Dari berbagai laporan, nampak jelas bahwa program keaksaraan seperti tersebut di atas telah menunjukkan keberhasilannya, hal tersebut terbukti dengan makin menurunnya jumlah penduduk yang buta huruf. Namun pada sisi lain muncul persoalan baru, diantaranya adalah : (1) bagaimana mempertahankan dan meningkatkan kemampuan kemelek-hurufan yang telah mereka raih, (2) perlunya pemberdayaan setelah penduduk menjadi melek huruf. Disamping dua alasan di atas, dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia saat ini, penyandang buta huruf diperkirakan akan bertambah lagi. Sebab, saat ini, penduduk miskin di Indonesia meningkat tajam, yang dengan sendirinya penduduk buta huruf-pun diperkirakan akan bertambah pula. Penyebab utama penambah buta huruf ini, menurut Mendikbud Prof. DR. Juwono Sudarsono adalah; anak usia sekolah yang tidak sekolah dan anak putus sekolah dasar terutama putus kelas 1, 2, dan 3. Kemiskinan sebagai akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan, juga menjadikan jumlah buta huruf makin banyak. Anak putus sekolah dan atau tidak dapat sekolah karena kemiskinan orang

tua akan memaksa anaknya untuk membantu orang tua mencari nafkah. Hal tersebut membawa implikasi terhadap keberadaan program keaksaraan itu sendiri, artinya konsep keaksaraan tidak hanya berarti terdiri atas kemampuan membaca, menulis dan berhitung, melainkan harus meliputi pula kemampuan lain yaitu kemampuan untuk menerapkan keterampilan tersebut di atas dalam kehidupan sehari-hari serta kemampuan untuk bertahan hidup. Perkembangan program keaksaraan seperti digambarkan diatas itu, pada saat ini dikenal dengan predikat *Keaksaraan Fungsional*.

Menurut beberapa studi yang pernah dilakukan, Kejar Paket A masih memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan yang paling menonjol dari Program Kejar Paket A menurut Joan Dixon (1995) terletak pada output kelompok sasaran yang menjadi "buta" kembali. Selain hal di atas, pelaksanaan program Kejar Paket A diduga ada kesalahan dalam pendataan kemampuan awal kelompok sasaran. Secara ideal, melalui program keaksaraan fungsional, diharapkan warga belajar dapat memilih menu pembelajaran yang diinginkan serta membentuk jaringan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang memang dibutuhkannya. Selain itu, Program Keaksaraan Fungsional juga tidak memerlukan seperangkat bahan belajar yang dipersiapkan dari Pemerintah karena segala bahan belajarnya senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan dan minat warga belajar, sehingga dapat langsung dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari warga belajar dan dapat meningkatkan mutu kehidupannya. Program Keaksaraan Fungsional sangat penting untuk dimasyarakatkan, mengingat dari beberapa hasil studi menunjukkan bahwa

kemampuan keaksaraan fungsional masyarakat itu jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan kemampuan keaksaraan secara umum. Sebagai suatu contoh, hasil studi yang dilakukan di Filipina (1989) menunjukkan bahwa tingkat keaksaraan dasar di Filipina sebesar 89,80 %, sedangkan tingkat keaksaraan fungsional sebesar 73,2 %. Hasil studi tersebut di atas berarti bahwa tingkat kebutahurufan di negara tersebut sebesar 10,2%, sedangkan tingkat kebutahurufan fungsionalnya lebih besar lagi, yaitu 26,8 %. Dari data tersebut di atas, nampak jelas bahwa pelaksanaan program keaksaraan perlu terus diberdayakan sesempurna mungkin, agar warga belajar dan masyarakat pada umumnya semakin mau dan mampu membelajarkan dirinya, tanpa merasa diintervensi pihak lain. Berbagai strategi dan terobosan baru perlu terus diupayakan dalam program keaksaraan, baik yang menyangkut rekrutmen calon warga belajar, fasilitator, tutor, nara sumber, maupun metode dan strategi pembelajaran.

Program-program keaksaraan, hendaknya memiliki nilai guna yang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Salah satu upaya untuk mencoba agar program-program keaksaraan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, adalah perlunya melakukan identifikasi kebutuhan belajar. Melalui kegiatan identifikasi kebutuhan belajar, diharapkan akan tergalikan jenis-jenis kebutuhan belajar aktual dari masyarakat yang bersangkutan. Dengan adanya identifikasi kebutuhan belajar aktual, juga jelas akan memperlihatkan bahwa Program Keaksaraan itu, munculnya benar-benar merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata merupakan tuntutan dari atas. Kebutuhan belajar pada setiap masyarakat tentu

saja relatif bervariasi, dengan demikian berarti bahwa kebutuhan belajar pada Program Keaksaraanpun relatif bervariasi pula. Makin mejemuk suatu masyarakat, tentu akan makin majemuk pula kebutuhan belajarnya, dan sebaliknya.

Penentuan kebutuhan belajar yang ideal, tentu saja harus disesuaikan dengan kebutuhan belajar masyarakat itu sendiri. Bila penentuan kebutuhan belajar tidak mengakomodasi kebutuhan masyarakatnya, tentu saja masyarakat yang menjadi warga belajar akan merasa asing dengan lingkungannya. Oleh karena itu penentuan kebutuhan belajar yang berorientasi kepada warga belajar (*learner centered*) di dalam Program Keaksaraan sangatlah penting, bahkan sangat menentukan kelanjutan program itu sendiri.

B. Pembatasan Masalah

Setelah memperhatikan uraian di atas, nampak jelas bahwa fokus studi ini adalah keaksaraan fungsional. Untuk kepentingan studi, penelitian diidentifikasi dengan satu pertanyaan pokok, yaitu faktor-faktor apakah yang mempengaruhi performansi Pamong Belajar, TLD dan Penilik Dikmas dalam penentuan identifikasi kebutuhan belajar yang digunakan pada program keaksaraan fungsional di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Ciamis.. Identifikasi kebutuhan belajar itu pada dasarnya menyangkut kesenjangan kemampuan diantara kemampuan yang telah dimiliki dengan kemampuan yang dituntut atau dipersyaratkan. Strategi identifikasi kebutuhan belajar sangat penting untuk ditentukan secara tepat, sebab bila salah dalam menentukannya, tentu saja akan menyebabkan kesalahan pula pada komponen-

komponen lainnya. Penentuan identifikasi kebutuhan belajar pada Program Keaksaraan Fungsional, tentu saja tidak lepas dari berbagai pengaruh komponen dinamik yang dimiliki para pelaksananya.

Pelaksanaan program keaksaraan fungsional pada dasarnya merupakan suatu sistem, yang tentu saja didalamnya melibatkan banyak komponen dinamis yang saling terkait satu sama lain. Salah satu komponen yang akan menjadi fokus studi dalam tesis ini adalah pelaksanaan strategi identifikasi kebutuhan belajar dilihat dari berbagai latar belakang para pelaksana identifikasi. Secara ideal, strategi penentuan kebutuhan belajar tentu saja harus memperhitungkan berbagai faktor lain, oleh karena itu penentuan strategi kebutuhan belajar harus dipertimbangkan secara efektif dan efisien, sebab bila tidak, sudah pasti akan mempengaruhi terhadap kelancaran komponen-komponen lainnya. Mengingat program keaksaraan fungsional itu merupakan suatu sistem, maka sudah pasti bila ada salah satu sistem yang lemah, maka akan mempengaruhi terhadap target yang sebelumnya telah ditetapkan secara matang.

Kelompok sasaran utama yang akan diidentifikasi dalam studi ini adalah Pamong Belajar SKB, Tenaga Lapangan Dikmas dan Penilik Dikmas yang pernah mengikuti pelatihan program Keaksaraan Fungsional, yang dilaksanakan di SKB Kabupaten Bandung dari tanggal 16 sampai dengan 24 Juni 1997 dan SKB Kabupaten Ciamis dari tanggal 10 sampai 18 Juli 1997. Dalam pelatihan tersebut, didalamnya diberikan satu materi pelatihan penting, yaitu cara mengidentifikasi kebutuhan belajar dari calon warga belajar yang berbeda dengan program sejenis

lainnya, yaitu cara melakukan identifikasi kebutuhan belajar dengan menggunakan teknik PRA (Participatory Rural Appraisal). Teknik PRA digunakan dalam penentuan identifikasi kebutuhan belajar, karena teknik ini diduga akan lebih memungkinkan dapat menjangkau kebutuhan belajar aktual dengan partisipasi penuh dari calon warga belajar tersebut. Adapun pihak-pihak yang dilatih adalah 15 orang Pamong Belajar SKB, 12 orang Tenaga Lapangan Dikmas (TLD) orang, dan 8 orang Penilik Dikmas.

Kepada pihak-pihak yang telah dilatih itu dipandang perlu untuk dievaluasi, khususnya mengenai penerapan berbagai materi pelatihan dalam membentuk dan menyelenggarakan kelompok belajar. Dalam studi ini, secara khusus akan dilihat mengenai penerapan cara identifikasi kebutuhan belajar dengan menggunakan teknik PRA oleh pihak-pihak yang telah dilatih.

C. Rumusan Masalah

Untuk kepentingan studi, masalah di atas dibatasi ke dalam pertanyaan pokok, yaitu “faktor-faktor apakah yang mempengaruhi performansi Pamong Belajar, Tenaga Lapangan Dikmas dan Penilik Dikmas dalam melakukan identifikasi kebutuhan belajar calon warga belajar pada Program Keaksaraan Fungsional?”. Kebutuhan belajar bagi warga belajar perlu senantiasa diidentifikasi secara cermat, agar program pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien. Kesalahan dalam penentuan kebutuhan belajar bagi warga belajar dalam program keaksaraan fungsional, tak mustahil akan mempengaruhi terhadap kelancaran realisasi program pembelajaran. Oleh karena itu, penentuan kebutuhan belajar merupakan suatu

subsistem pembelajaran PLS yang senantiasa harus mendapatkan prioritas utama. Apabila proses pembelajaran dalam PLS tidak sesuai dengan kebutuhan belajar, maka warga belajar tidak mau belajar. Dalam pembelajaran PLS, identifikasi kebutuhan belajar itu merupakan langkah pertama. Langkah pertama, dimaksudkan guna menentukan kurikulum belajar, sedangkan langkah terakhir dimaksudkan guna menentukan prioritas kebutuhan belajar berikutnya.

Untuk menentukan cara identifikasi kebutuhan belajar pada Program Keaksaraan Fungsional yang ideal, diperlukan adanya ujicoba kepada calon khalayak sasaran (warga belajar), dengan tetap memperhitungkan berbagai referensi latar belakang khalayak sasaran tersebut.

Penentuan cara identifikasi kebutuhan belajar dari calon warga belajar pada Program Keaksaraan Fungsional pada dasarnya merupakan suatu produk performansi dari Pamong Belajar, Tenaga Lapangan Dikmas dan Penilik Dikmas. Sedangkan di sisi lain, penentuan cara identifikasi itu juga merupakan suatu keputusan, yang tak terlepas dari berbagai komponen dan latar belakang dinamik, seperti pengalaman kerja, frekuensi pelatihan, rentang waktu pelatihan dan motivasi berprestasi. Jadi, dalam studi ini keempat komponen di atas, dijadikan sebagai variabel bebas, yang diduga akan mempengaruhi performansi Pamong Belajar, tenaga Lapangan Dikmas maupun Penilik Dikmas dalam menentukan identifikasi kebutuhan belajar. Dasar pertimbangan memasukkan keempat komponen di atas sebagai variabel bebas dalam studi adalah bahwa :

1. Ada kecenderungan harapan bahwa semakin tinggi pengalaman kerja seseorang, diharapkan akan mampu meningkatkan kinerjanya.
2. Semakin tinggi frekuensi pelatihan program-program PLS, khususnya dalam Program Keaksaraan Fungsional, diharapkan akan makin memperkaya wawasan pengetahuan dan keterampilan peserta pelatihan dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar.
3. Semakin dekat rentang waktu pelatihan dengan pembentukan kelompok belajar, diharapkan akan makin baik dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar, mengingat pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh dalam pelatihan relatif masih segar.
4. Motivasi berprestasi merupakan suatu dorongan, baik yang berasal dari dalam maupun luar yang akan memberikan kekuatan di dalam melaksanakan suatu kegiatan agar mencapai prestasi yang maksimal. Dengan demikian berarti diharapkan semakin tinggi motivasi berprestasi seseorang, maka kinerjanya pun akan semakin baik pula.

Untuk kepentingan penelitian ini, pertanyaan di atas diturunkan lagi kedalam beberapa pertanyaan penelitian operasional, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah terdapat hubungan fungsional antara pengalaman kerja dengan performansi penentuan identifikasi kebutuhan belajar pada Program Keaksaraan Fungsional ?

2. Apakah terdapat hubungan fungsional antara frekuensi pelatihan dengan performansi penentuan identifikasi kebutuhan belajar pada Program Keaksaraan Fungsional ?
3. Apakah terdapat hubungan fungsional antara rentang waktu pelatihan dengan performansi penentuan identifikasi kebutuhan belajar pada Program Keaksaraan Fungsional ?
4. Apakah terdapat hubungan fungsional antara motivasi dengan performansi penentuan identifikasi kebutuhan belajar pada Program Keaksaraan Fungsional ?
5. Apakah faktor pengalaman kerja, frekuensi pelatihan, rentang waktu pelatihan, dan motivasi berprestasi memiliki hubungan fungsional dengan performansi penentuan identifikasi kebutuhan belajar pada Program Keaksaraan Fungsional ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian di atas, studi ini pada dasarnya bertujuan untuk mengungkap hal-hal berikut, yaitu :

1. Mengkaji hubungan fungsional antara pengalaman kerja dengan performansi penentuan identifikasi kebutuhan belajar pada Program Keaksaraan Fungsional.
2. Mengkaji hubungan fungsional antara frekwensi pelatihan dengan performansi penentuan identifikasi kebutuhan belajar pada Program Keaksaraan Fungsional.
3. Mengkaji hubungan fungsional antara rentang waktu pelatihan dengan performansi penentuan identifikasi kebutuhan belajar pada Program Keaksaraan Fungsional.

4. Mengkaji hubungan fungsional antara motivasi berprestasi dengan performansi penentuan identifikasi kebutuhan belajar pada Program Keaksaraan Fungsional.
5. Mengkaji hubungan fungsional antara pengalaman kerja, frekuensi pelatihan, rentang waktu pelatihan dan motivasi berprestasi dengan performansi penentuan identifikasi kebutuhan belajar pada Program Keaksaraan Fungsional

E. Hipotesis

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, pada bagian ini akan dikemukakan hipotesis. Hipotesis yang dimaksudkan di atas adalah sebagai berikut :

1. Terdapat hubungan fungsional antara pengalaman kerja dengan performansi Pamong Belajar, Tenaga Lapangan Dikmas (TLD) dan Penilik Dikmas dalam penentuan identifikasi kebutuhan belajar pada Program Keaksaraan Fungsional.
2. Terdapat hubungan fungsional antara frekuensi pelatihan PLS dengan performansi Pamong Belajar, TLD dan Penilik Dikmas dalam penentuan identifikasi kebutuhan belajar dalam Program Keaksaraan Fungsional.
3. Terdapat hubungan fungsional antara rentang waktu pelatihan dengan performansi Pamong Belajar TLD dan Penilik Dikmas dalam penentuan identifikasi kebutuhan belajar pada Program Keaksaraan Fungsional
4. Terdapat hubungan fungsional antara motivasi berprestasi dengan performansi Pamong belajar, TLD dan Penilik Dikmas dalam penentuan identifikasi kebutuhan belajar pada Program Keaksaraan Fungsional.

5. Terdapat hubungan fungsional secara bersama-sama antara pengalaman kerja, frekuensi pelatihan, rentang waktu pelatihan dan motivasi berprestasi terhadap performansi Pamong Belajar, TLD dan Penilik Dikmas dalam penentuan identifikasi kebutuhan belajar pada Program Keaksaraan Fungsional.

F. Definisi Operasional

Setelah memperhatikan hipotesis di atas, baik pada latar belakang, perumusan masalah, maupun jenis data yang diharapkan akan terkumpul, nampak jelas bahwa dalam studi ini terdapat empat subtopik utama, yaitu :

1. Identifikasi kebutuhan belajar
2. Program Keaksaraan Fungsional
3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi performansi Pamong Belajar, TLD dan Penilik Dikmas dalam penentuan identifikasi kebutuhan belajar, dan
4. Performansi

Keempat subtopik tersebut, perlu diberikan pengertian dan parameter yang jelas dalam bentuk definisi operasional, dengan harapan supaya tidak menimbulkan salah penafsiran dan kesesatan dalam pelaksanaan penelitian.

Kebutuhan belajar, seperti halnya dikemukakan oleh Ishak Abdulhak (1997 : 23) diartikan sebagai kesenjangan kemampuan diantara kemampuan yang telah dimiliki dengan kemampuan yang dituntut atau dipersyaratkan dalam kehidupan (perorangan, pekerjaan dan masyarakat Sedangkan menurut Djudju Sudjana (1991

:168), kebutuhan belajar diartikan sebagai suatu jarak antara tingkat pengetahuan, keterampilan dan/atau sikap yang dimiliki dengan tingkat pengetahuan, keterampilan dan atau sikap yang ingin diperoleh seseorang, kelompok, lembaga dan atau masyarakat yang dapat dicapai melalui kegiatan belajar.

Kebutuhan belajar pada dasarnya dapat dibagi atas dua kategori utama, yaitu :

1. Kebutuhan terasa, yakni kebutuhan yang segera dapat dirasakan dan diketahui langsung oleh masyarakat, baik secara individual maupun kelompok, misalnya bagaimana caranya meningkatkan pendapatan, bagaimana mempromosikan barang produksi dan bagaimana pula caranya mendidik anak yang efektif.
2. Kebutuhan terduga, yaitu kebutuhan yang tidak dirasakan dan diketahui langsung oleh sasaran tetapi diduga dan dikehendaki oleh orang lain, misalnya oleh tokoh masyarakat, kebijaksanaan pemerintah, baik secara lokal, regional maupun internasional, misalnya seperti pemberantasan buta huruf, gerakan keluarga berencana, penggunaan bahasa nasional dan meningkatkan penggunaan produk-produk nasional.

Sedangkan Bradshaw dalam Djudju Sudjana (1991 : 137) menyatakan bahwa kebutuhan belajar itu dapat diklasifikasikan kedalam empat tipe, yaitu kebutuhan normatif (*normative need*), kebutuhan terasa (*felt need*), kebutuhan yang dinyatakan (*expressed need*) dan kebutuhan bandingan (*comparative need*).

Kebutuhan belajar masyarakat perlu senantiasa diinventarisasi. Hal tersebut dimaksudkan agar program-program yang ditawarkan kepada masyarakat benar-benar dirasakan manfaatnya bagi kehidupan mereka sehari-hari. Program link and match

yang digulirkan Mendikbud RI pada akhir-akhir ini merupakan suatu terobosan agar program-program pendidikan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Terjadinya kesalahan dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar, tentu saja akan menyesatkan warga belajar. Oleh karena itu, bila dunia pendidikan kita ingin tetap eksis di tengah-tengah lingkungan masyarakatnya, maka identifikasi kebutuhan belajar merupakan suatu tuntutan mutlak.

Konsep kedua dari studi ini adalah keaksaraan fungsional. Jauh sebelum dikenal istilah keaksaraan fungsional, sebelumnya telah diperkenalkan konsep keaksaraan. Keaksaraan (literacy) menurut UNESCO seperti halnya dikutip Arif (1994 : 17) adalah kemampuan yang dicapai seseorang dalam hal menulis, berhitung dan membaca sederhana dalam kehidupannya sehari-hari. Sedangkan keaksaraan fungsional (functional literacy) adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan kecakapan keaksaraannya secara efektif dan fungsional dalam kehidupannya sehari-hari dalam kelompoknya serta memungkinkan dia menggunakan kecakapan membaca, menulis dan berhitung itu untuk pembangunan masyarakatnya. Sedangkan menurut UNESCO dan UNDP seperti halnya dikutip Arif (1994 : 18) disebutkan bahwa keaksaraan fungsional itu :

merupakan suatu kemampuan pengetahuan umum yang bersifat dasar dan kemampuan dalam bekerja, meningkatkan produktifitas, meningkatkan partisipasi dalam kehidupan bernegara serta pemahaman yang lebih baik terhadap lingkungannya.

Masih berkaitan dengan konsep keaksaraan fungsional, lebih jauh Hartley (1989) seperti halnya dikutip Arif (1994 : 19) mengatakan bahwa :

keaksaraan fungsional merupakan integrasi dari aspek-aspek kemampuan mendengar, berbicara, membaca, menulis, berfikir kritis dan berhitung. Hal tersebut meliputi pula pengetahuan budaya yang memungkinkan pembicara, penulis atau pembaca mengakui dan menggunakan bahasa yang memadai untuk situasi yang berbeda

Bagi masyarakat yang sudah maju keaksaraan fungsional tersebut akan memungkinkan seseorang individu menggunakan bahasa untuk meningkatkan kapasitasnya untuk berpikir kritis, mengemukakan pertanyaan dan pendapat, serta memberikan nilai tambah pengetahuan agar mereka eksis di tengah-tengah masyarakatnya.

Konsep ketiga dari topik di atas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi performansi Pamong Belajar, TLD dan Penilik Dikmas dalam penentuan identifikasi kebutuhan belajar. Seperti telah dikatakan sebelumnya, bahwa cara melakukan identifikasi kebutuhan belajar pada dasarnya merupakan produk dari serangkaian proses yang melibatkan berbagai komponen dan atau faktor. Faktor-faktor yang diduga akan mempengaruhi performansi Pamong belajar, TLD dan Penilik Dikmas dalam penentuan identifikasi kebutuhan belajar itu, diantaranya adalah sebagai berikut : Pengalaman kerja, Frekuensi Pelatihan, Rentang waktu pelatihan dan Motivasi berprestasi.

Untuk kepentingan penelitian, keempat faktor yang diduga akan mempengaruhi performansi Pamong belajar, TLD dan Penilik Dikmas dalam penentuan identifikasi kebutuhan belajar tersebut diperlukan adanya parameter yang

jelas dan terukur (measurable). Pengalaman kerja adalah rentangan waktu dan atau riwayat pekerjaan bagi Pamong Belajar SKB, TLD dan Penilik Dikmas berkecimpung dalam kegiatan-kegiatan pendidikan, baik di lingkungan pendidikan luar sekolah maupun pendidikan sekolah. Pengalaman kerja ini, parameter yang digunakannya adalah tahun dan lamanya bekerja.

Pelatihan menurut Flippo sebagaimana dikutip Hufad (1996 : 9) adalah pelatihan pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kecakapan agar karyawan dapat mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Sedangkan lebih jauh menurut Inpres No. 15 tahun 1974, sebagaimana dikutip Hufad (1996 : 10) mengatakan bahwa pelatihan adalah sebagai berikut :

..... pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan biasa dalam waktu yang berlangsung singkat dengan metode yang mengutamakan praktek dari pada teori. Pelatihan pegawai adalah sebagian dari pendidikan yang dilakukan pegawai untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan persyaratan pekerjaan tersebut.

Sedangkan rentang waktu pelatihan adalah jarak atau rentangan antara pelatihan dengan pembentukan kelompok belajar.

Motivasi menurut Sutaryat (1984 : 156) dikemukakannya sebagai berikut : motivasi sering pula disebut sebagai dinamika perilaku. Motivasi sebagai dinamika perilaku tidak banyak berurusan dengan apa yang diperbuat, juga tidak dengan bagaimana apa yang diperbuat itu diselesaikan, akan tetapi dengan mengapa seseorang individu berbuat seperti yang dikerjakan. Timbulnya motivasi pada diri seseorang pada

dasarnya merupakan hasil dari organisasi fisiologik dan kegiatan kerja sistem syaraf sentral individu.

Sedangkan menurut Staton sebagaimana dikutip Farihah (1992 : 40) mengatakan bahwa motivasi merupakan unsur yang paling penting dalam belajar yang efisien, karena seseorang akan berhasil jika ia memiliki motivasi untuk belajar. Lebih jauh Richard M. Steers, sebagaimana dikutip Farihah (1992 : 40) juga mengatakan bahwa “the term motivation was originally drived from the Latin word movere, wich means to move”. Menurut studi yang dilakukan Richard M Steers di atas, bila kita akan membicarakan motivasi ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu (1) what energizes human behaviour, (2) what directs or channels such behaviour and, (3) how this behaviour is maintained or sustained.

Adanya kecenderungan untuk melakukan sesuatu tindakan pada dasarnya tak akan lepas dari motivasi. Berkaitan dengan hal tersebut, McClelland mengemukakan ada tiga hal yang mempengaruhi motivasi seseorang, yaitu : (1) Kebutuhan untuk memperoleh kekuasaan (need for power), (2) Kebutuhan untuk berprestasi (need for achievement), dan (3) Kebutuhan untuk bergabung (need for affiliation). Konsep David McClelland yang diistilahkannya dengan “N-Ach” (need for achievement) tersebut merupakan naluri yang mengakibatkan seseorang ingin berprestasi dengan jalan kerja keras. Lebih lanjut McClelland sebagaimana dikutip Farihah (1992 : 42) menyatakan bahwa individu yang memiliki motif berprestasi tinggi memiliki sifat-sifat :

1. Menyukai pekerjaan yang menuntut kemampuan dan usaha dari dalam diri sendiri
2. Memiliki antisipasi yang baik terhadap aktifitas yang akan dilakukan, dalam arti apakah ia memiliki kemampuan atau tidak untuk melakukan sesuatu aktifitas.
3. Selalu ingin mengetahui hasil dari usaha yang telah dilakukannya.

Imbalan material adalah suatu penghargaan dalam bentuk materi yang diberikan kepada seseorang dan atau sekelompok setelah melakukan suatu pekerjaan/aktivitas tertentu. Besar kecilnya imbalan material, tentu saja akan memberikan dampak bagi individu, baik secara psikologis maupun non psikologis. Dalam studi ini, imbalan material yang dimaksudkan di atas berupa besar kecilnya uang lelah/honorarium yang diterima, baik oleh Pamong Belajar, TLD maupun Penilik Dikmas setelah melakukan suatu kegiatan profesinya. Imbalan material dalam studi ini, dimasukkan kedalam ranah motivasi

Konsep terakhir yang perlu mendapat penjelasan lebih jauh adalah performansi. Menurut Kamus Umum bahasa Indonesia yang ditulis Poerwadarminta, Performansi berasal dari kata perform, diartikan melakukan dan atau menyelenggarakan. Sedangkan performansi, lebih jauh diartikan sebagai pelaksanaan dan atau penyelenggaraan tugas dan kewajiban dari seseorang dan atau kelompok sesuai dengan posisinya di masyarakat dan atau kedinasan. Jadi, yang dimaksudkan dengan performansi dalam studi ini adalah upaya penyelenggaraan yang dilakukan oleh para Pamong Belajar SKB, TLD dan Penilik Dikmas dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar para calon warga belajar pada Program Keaksaraan Fungsional. Sedangkan menurut Bedjo Siswanto (1989 : 195) performansi itu juga dapat

diidentikkan dengan prestasi kerja. Lebih jauh mengenai hal itu, masih menurut Bedjo Siswanto (1989 : 195), dikemukakannya sebagai berikut :

Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang tenaga kerja dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang dibebankannya kepadanya. Pada umumnya prestasi kerja seseorang dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan, pengalaman dan kesungguhan dari tenaga kerja yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga kerja (man power) adalah sekelompok penduduk yang berusia kerja. Di Indonesia kelompok usia kerja itu adalah penduduk berusia 10 tahun keatas.

Mengacu kepada definisi operasional di atas, nampak jelas bahwa studi ini pada dasarnya akan mencoba mengkaji cara-cara dan atau teknik mengidentifikasi kebutuhan belajar dengan teknik PRA pada Program Keaksaraan Fungsional, khususnya pada kasus Program Keaksaraan Fungsional yang diselenggarakan di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Ciamis.

G. Kegunaan Penelitian

Bertitik tolak dari latar belakang, perumusan masalah, definisi operasional dan tujuan penelitian di atas, akhir dari studi ini diharapkan akan memiliki nilai guna, baik bagi pengembangan keilmuan Pendidikan Luar Sekolah maupun bagi kepentingan praktis di lapangan.

Kegunaan hasil penelitian ini bagi pengembangan keilmuan adalah memberikan masukan dalam pengembangan konsep belajar membelajarkan, terutama dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar aktual melalui pendekatan PRA. Sedangkan secara praktis, kegunaan dari hasil studi ini diharapkan dapat digunakan

sebagai salah satu pedoman dalam pengelolaan program-program PLS, baik bagi para perencana maupun juga bagi para praktisi di lapangan.

H. Sistematika Pembahasan

Tesis ini pada dasarnya akan dibagi ke dalam 5 bagian. Kelima bagian yang dimaksudkan di atas adalah sebagai berikut :

Bagian kesatu, berisi Bab I, didalamnya dibahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional serta sistematika pelaporan.

Bagian kedua, berisi Bab II, didalamnya dibahas mengenai tinjauan konseptual dan teori-teori pendidikan luar sekolah serta keaksaraan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Selain itu, pada Bab II juga akan dicoba diungkap beberapa hasil studi yang pernah dilakukan, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan program keaksaraan.

Bagian ketiga, berisi Bab III, didalamnya dibahas mengenai metodologi penelitian yang akan digunakan, desain penelitian, pengembangan instrumen, maupun penentuan subyek penelitian yang akan diminta datanya.

Bagian keempat, berisi Bab IV, didalamnya dikemukakan mengenai data hasil penelitian, pembahasan dan beberapa keterbatasan penelitian.

Bagian kelima, berisi Bab V, didalamnya dikemukakan mengenai intisari dan kesimpulan hasil penelitian serta rekomendasi yang memungkinkan untuk dilakukan aksi, baik untuk kepentingan keilmuan pendidikan luar sekolah itu sendiri maupun untuk para praktisi pendidikan luar sekolah pada umumnya.



